



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AKHMAD SAGIR**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN**
3. NHK : **838882**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.973.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 502.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/75 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
3. Tanah Seluas 132 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.201.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/130 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 21.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA SCOTER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 48.613.789

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----



Sub Total	Rp.	2.093.113.789
III. HUTANG	Rp.	80.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.013.113.789

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.